
Implementasi Strategi Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Solok Selatan

Vigo Dwi Putra*, Adil Mubarak

Universitas Negeri Padang

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Solok Selatan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi pada Bappeda, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, serta Balai Latihan Kerja (BLK). Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemerintah telah berjalan cukup efektif melalui tiga sektor utama, yaitu pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Program pendidikan difokuskan pada pembangunan dan peningkatan mutu guru, sektor kesehatan diarahkan pada pengendalian stunting serta layanan kesehatan, sedangkan sektor ketenagakerjaan melalui pelatihan vokasi meningkatkan keterampilan masyarakat. IPM Kabupaten Solok Selatan meningkat dari 69,04 (2020) menjadi 72,24 (2024), meskipun masih di bawah rata-rata Provinsi Sumatera Barat dan nasional. Diperlukan pemerataan program, optimalisasi anggaran, dan penguatan evaluasi agar strategi peningkatan IPM lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Implementasi Strategi, Pemerintah Daerah, IPM, Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan

DOI:

<https://doi.org/10.47134/villages.v6i2.328>

*Correspondence: Vigo Dwi Putra

Email: vigodwiputra08@gmail.com

Received: 30-06-2025

Accepted: 30-07-2025

Published: 30-08-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This study aims to analyze the implementation of local government strategies in improving the Human Development Index (HDI) in Solok Selatan Regency using a qualitative descriptive method through interviews, observations, and documentation involving Bappeda, the Department of Education, the Department of Health, and the Vocational Training Center (BLK). The results show that the government's strategy has been fairly effective through three main sectors: education, health, and employment. Educational programs focus on infrastructure development and teacher quality improvement; the health sector emphasizes stunting control and health service enhancement; while the employment sector focuses on vocational training to improve community skills. The HDI of Solok Selatan Regency increased from 69.04 (2020) to 72.24 (2024), although it remains below the provincial and national averages. Therefore, equitable program distribution, budget optimization, and stronger evaluation mechanisms are needed to make HDI improvement strategies more effective and sustainable.

Keywords: Strategy Implementation, Local Government, Human Development Index, Education, Health, Employment

Pendahuluan

Strategi merupakan komponen penting dalam perencanaan pembangunan daerah karena berfungsi sebagai pedoman menyeluruh yang terintegrasi dan sistematis untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut Kotler et al. (2021), strategi berperan dalam menyelaraskan sumber daya dan arah kebijakan agar organisasi dapat mencapai keunggulan kompetitif secara berkelanjutan. Purwanto (2021) menambahkan bahwa strategi tidak hanya berfungsi sebagai alat perencanaan, tetapi juga sebagai instrumen adaptif dalam menghadapi dinamika sosial-ekonomi. Sementara itu, Hamid et al. (2023) menegaskan bahwa strategi mencakup upaya organisasi dalam memanfaatkan peluang eksternal untuk memperkuat efektivitas internal, sedangkan Sutardji (2023) menyebut strategi sebagai bentuk tindakan sadar untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan organisasi. Dalam konteks pemerintahan daerah, strategi pembangunan menjadi instrumen penting dalam menentukan arah kebijakan publik yang terukur dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Dalam kerangka pembangunan nasional, strategi pemerintah daerah memiliki kontribusi signifikan terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang mencerminkan kualitas hidup masyarakat. IPM digunakan sebagai indikator komprehensif yang mengukur keberhasilan pembangunan manusia dalam tiga dimensi utama, yaitu pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak (Zulkarnain, 2018). Menurut Sultan et al. (2023), IPM menjadi tolok ukur penting bagi pemerintah daerah untuk menilai efektivitas kebijakan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Selanjutnya, penelitian oleh Salsabila et al. (2024) menunjukkan bahwa peningkatan IPM erat kaitannya dengan perencanaan strategis daerah yang fokus pada pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan serta peningkatan kualitas tenaga kerja. Dengan demikian, IPM tidak hanya menjadi indikator statistik, tetapi juga refleksi langsung dari keberhasilan implementasi strategi pembangunan manusia.

Salah satu daerah dengan capaian IPM yang masih rendah di Provinsi Sumatera Barat adalah Kabupaten Solok Selatan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2024), IPM Kabupaten Solok Selatan masih di bawah rata-rata provinsi dan nasional. Kota Padang mencatatkan IPM tertinggi dengan nilai 83,98, sementara Kabupaten Solok Selatan hanya mencapai 72,24. Perbandingan tersebut dapat dilihat pada Tabel 1, yang menampilkan IPM kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2024. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Raldo & Samsuddin (2025) yang menyebutkan bahwa ketimpangan antarwilayah di Sumatera Barat dipengaruhi oleh disparitas infrastruktur dan akses layanan dasar. Menurut Bashrihan et al. (2023), daerah dengan keterbatasan fasilitas publik cenderung mengalami pertumbuhan IPM yang lebih lambat dibandingkan wilayah perkotaan. Kondisi ini menegaskan pentingnya strategi pembangunan yang kontekstual dan berbasis data lokal untuk mempercepat peningkatan kualitas manusia.

Tabel 1. IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	IPM 2024
1	Kota Padang	83,98
8	Provinsi Sumatera Barat	76,43
12	Nasional	74,39
16	Kabupaten Solok Selatan	72,24

Sumber: Badan Pusat Statistik Sumatera Barat, 2024.

Meskipun IPM Kabupaten Solok Selatan menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, capaian tersebut masih belum optimal untuk menembus rata-rata nasional. Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA, 2024), IPM meningkat dari 69,23 pada tahun 2021 menjadi 72,24 pada tahun 2024. Tren peningkatan tersebut disajikan dalam Tabel 2 yang menggambarkan perkembangan IPM selama empat tahun terakhir. Penelitian oleh Sutrisna (2020) menegaskan bahwa keberlanjutan pertumbuhan IPM sangat dipengaruhi oleh efektivitas implementasi kebijakan lintas sektor, terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Sementara itu, studi oleh Azfirmawarman et al. (2023) menyatakan bahwa keselarasan antara kebijakan daerah dan nasional menjadi kunci utama untuk mempercepat peningkatan IPM. Oleh karena itu, evaluasi terhadap strategi yang telah diterapkan menjadi penting untuk memastikan arah kebijakan berjalan sesuai tujuan pembangunan daerah (Wika, 2024).

Tabel 2. Tren IPM Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021–2024

Tahun	IPM
2021	69,23
2022	69,71
2023	70,58
2024	72,24

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Solok Selatan, 2024.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Selatan 2020–2025, strategi peningkatan IPM difokuskan pada tiga sektor utama, yaitu pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan (BAPPEDA, 2024). Upaya tersebut meliputi peningkatan kualitas guru, penguatan fasilitas kesehatan, serta pengembangan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan vokasi. Strategi ini sejalan dengan temuan Shobri & Syahbudi (2022) yang menegaskan bahwa sinergi antar sektor pendidikan dan tenaga kerja memiliki dampak signifikan terhadap percepatan peningkatan IPM di daerah. Selain itu, pendekatan pembangunan berbasis kesejahteraan manusia juga sejalan dengan teori *Human Development Approach* dari Sen (1999) yang menekankan pentingnya

peningkatan kapabilitas individu melalui kebijakan publik yang inklusif (Mahmud et al., 2025). Dengan demikian, strategi yang efektif perlu diimplementasikan secara berkelanjutan dengan dukungan kebijakan lintas sektor (Alfayed et al, 2024).

Namun, implementasi strategi tersebut belum sepenuhnya efektif. Berdasarkan analisis lapangan, beberapa kendala utama yang dihadapi antara lain keterbatasan tenaga medis dan sarana kesehatan, ketimpangan akses pendidikan antarwilayah, serta rendahnya kompetensi tenaga kerja lokal (BAPPEDA, 2024). Menurut penelitian Mukroni & Tjenreng (2025), hambatan ini mencerminkan lemahnya koordinasi antarinstansi serta kurang optimalnya manajemen anggaran pembangunan. Selain itu, studi oleh Setiono (2021) menemukan bahwa keberhasilan implementasi strategi pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kapasitas sumber daya manusia birokrasi dalam mengelola program lintas sektor. Sebagaimana dikemukakan oleh Muminah & Suprajogo (2025) efektivitas kebijakan publik membutuhkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar program pembangunan dapat berjalan berkelanjutan.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Solok Selatan serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya (Putri et al, 2024). Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris terhadap penguatan kebijakan pembangunan manusia di tingkat daerah dan menjadi referensi akademik dalam pengembangan teori implementasi kebijakan publik di Indonesia (Ainia et al, 2023).

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis implementasi strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Solok Selatan. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial secara kontekstual melalui interaksi langsung antara peneliti dan subjek penelitian. Menurut Sugiyono (2022), penelitian kualitatif deskriptif berlandaskan pada filsafat post-positivisme, yang digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah dengan peneliti sebagai instrumen utama. Sejalan dengan itu, Moleong & Surjaman (2018) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, motivasi, dan strategi tindakan dalam konteks sosial tertentu.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Lokasi ini dipilih secara purposive karena merupakan daerah dengan tingkat IPM yang masih berada di bawah rata-rata provinsi. Fokus penelitian diarahkan pada tiga instansi utama yang terlibat langsung dalam implementasi strategi peningkatan IPM, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan

Kabupaten Solok Selatan. Selain itu, penelitian juga dilakukan di Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai lembaga yang berperan dalam peningkatan kompetensi tenaga kerja, serta melibatkan masyarakat setempat sebagai penerima manfaat program.

Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu memilih individu yang dinilai memahami secara mendalam fenomena penelitian dan dapat memberikan informasi relevan. Menurut Nurrisa et al. (2025), informan penelitian merupakan subjek yang memiliki pengalaman langsung dan wawasan luas mengenai permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, informan terdiri dari pejabat pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Solok Selatan.

Tabel 3. Daftar Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan
1	Edison, S.E.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, Penelitian, dan Pengembangan BAPPEDA
2	Khairul Musdi, S.Pt.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pendidikan
3	Sri Hastuti, S.E.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Kesehatan
4	Tomi Katrisman, S.IP.	Kepala Seksi Pelatihan dan Sertifikasi BLK Solok Selatan
5–10	Masyarakat	Warga Kabupaten Solok Selatan (6 orang)

Sumber: Data penelitian, 2025.

Data penelitian diperoleh melalui dua jenis sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci yang terdiri dari pejabat BAPPEDA, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan BLK Kabupaten Solok Selatan. Wawancara juga dilakukan dengan enam masyarakat penerima manfaat untuk menggambarkan persepsi dan pengalaman langsung terhadap implementasi kebijakan peningkatan IPM. Data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen dan literatur resmi, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2020–2025, laporan tahunan perangkat daerah, publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), serta hasil penelitian terdahulu dan jurnal ilmiah yang relevan dengan topik pembangunan manusia dan implementasi kebijakan publik.

Untuk menjamin kedalaman data, digunakan tiga teknik utama dalam pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara dilakukan secara semi terstruktur agar peneliti dapat menggali informasi sesuai pedoman pertanyaan sekaligus membuka ruang untuk eksplorasi data baru yang muncul selama proses wawancara. Proses wawancara dilaksanakan pada Juli–Agustus 2025 di berbagai instansi terkait. Misalnya, wawancara dengan Kepala Bidang

BAPPEDA dilakukan pada 30 Juli 2025, dengan Kepala Sub Bagian Dinas Pendidikan pada 31 Juli 2025, dengan Kepala Sub Bagian Dinas Kesehatan pada 4 Agustus 2025, serta dengan Kepala Seksi BLK pada 5 Agustus 2025. Wawancara dengan masyarakat dilaksanakan pada 6–7 Agustus 2025 di beberapa kecamatan di Kabupaten Solok Selatan.

2. Observasi

Teknik observasi dilakukan dengan mengamati langsung kondisi lapangan, seperti sarana pendidikan, fasilitas kesehatan, serta kegiatan pelatihan kerja di BLK. Observasi digunakan untuk memperoleh data faktual mengenai pelaksanaan strategi pemerintah daerah dalam upaya peningkatan IPM serta untuk memverifikasi hasil wawancara.

3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data wawancara dan observasi melalui penelusuran dokumen resmi pemerintah, laporan capaian kinerja, serta foto lapangan yang menggambarkan kondisi nyata di lokasi penelitian. Dokumen seperti RPJMD, laporan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, serta data IPM dari BPS menjadi sumber utama untuk mendukung validitas analisis.

Untuk menjamin keabsahan hasil penelitian, digunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai pihak, seperti BAPPEDA, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, BLK, dan masyarakat. Sementara itu, triangulasi teknik dilakukan dengan memadukan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pendekatan triangulasi ini memungkinkan peneliti memeriksa konsistensi informasi antar sumber dan teknik, sehingga data yang dihasilkan menjadi lebih valid, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Sugiyono, 2022).

Analisis data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan sejak pengumpulan data hingga tahap penarikan kesimpulan. Model analisis yang digunakan mengacu pada konsep Miles et al. (2018), yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu:

1. Reduksi Data

Tahap ini dilakukan dengan cara menyeleksi, memfokuskan, dan menyederhanakan data mentah yang diperoleh dari lapangan. Reduksi data membantu peneliti mengidentifikasi tema, pola, dan kategori yang relevan dengan fokus penelitian.

2. Penyajian Data

Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, dan matriks untuk memudahkan pemahaman hubungan antarvariabel dan mendukung interpretasi fenomena implementasi strategi pemerintah daerah.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis tematik dan triangulasi. Kesimpulan bersifat sementara dan akan diverifikasi secara terus-menerus hingga diperoleh hasil yang valid dan konsisten dengan realitas lapangan.

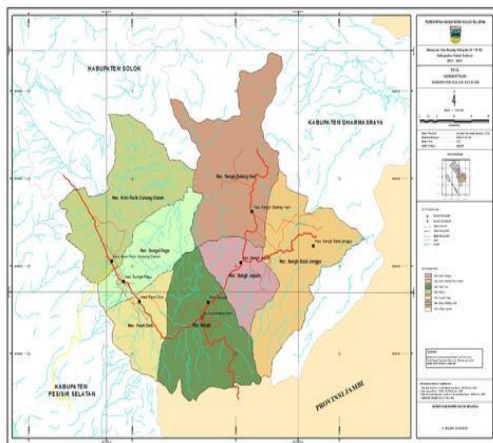
Melalui tahapan analisis ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran empiris yang mendalam mengenai efektivitas implementasi strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Solok Selatan serta faktor-faktor yang memengaruhinya.

Hasil dan Pembahasan

A. Temuan Umum

1) Deskripsi Objek Penelitian

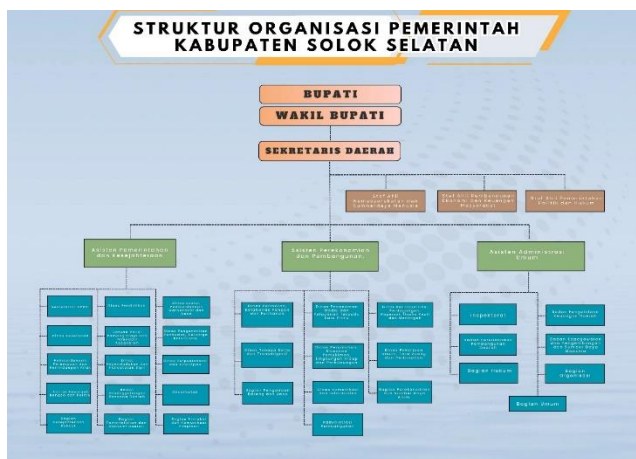
Letak dan kondisi geografis. Kabupaten Solok Selatan berada di selatan Provinsi Sumatera Barat, berdekatan dengan Gunung Kerinci, ber-ibu kota di Padang Aro (≈ 161 km dari Kota Padang). Luas wilayah $\pm 3.346,20$ km² (≈ 359.013 ha) dengan ketinggian rata-rata 350–430 mdpl. Sekitar 41,93% adalah kawasan hutan lindung dan 58,07% kawasan budidaya; morfologi bervariasi dari dataran, perbukitan hingga pegunungan Bukit Barisan.



Gambar 1. Peta Kabupaten Solok Selatan

Demografi. Penduduk berjumlah 182.027 jiwa (92.859 laki-laki; 89.168 perempuan). Struktur usia didominasi kelompok produktif (15–64 tahun) yang menjadi modal demografi, namun belum sepenuhnya dimanfaatkan karena keterbatasan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, keterampilan). Konsentrasi kepadatan relatif lebih tinggi di Sangir dan Sungai Pagu dibanding wilayah perbukitan/nagari terpencil (BPS Kabupaten Solok Selatan, 2024).

Pemerintah daerah dan perangkat pelaksana. Pemda (sejak 2004) mengakselerasi pembangunan melalui RPJMD; koordinasi lintas-OPD mencakup Bappeda, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan BLK. Bappeda memegang fungsi perencanaan-pengendalian; Dinas Pendidikan mengelola layanan PAUD-SMP, sarpras, mutu guru; Dinas Kesehatan menjalankan layanan primer/rujukan, gizi, pengendalian stunting dan jaminan kesehatan; BLK menyelenggarakan pelatihan vokasi dan pemagangan kerja.



Gambar 2. Struktur Pemerintah Kabupaten Solok Selatan

B. Temuan Khusus (Berbasis Data Lapangan)

1) Strategi 1 – Alokasi anggaran berkualitas (pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, Pendidikan).

Dari wawancara, anggaran pendidikan *fluktuatif*: ±Rp30 miliar (2022), ±Rp28 miliar (2023), dan ±Rp14 miliar (2024). Dana mayoritas bersumber dari DAK/DAU dan terserap untuk program prioritas: pembangunan/rehabilitasi ruang kelas, perpustakaan, laboratorium komputer/IPA, UKS, serta pelatihan guru. Kendala utama ialah keterbatasan fiskal dan tingginya porsi belanja rutin sehingga ruang peningkatan mutu terbatas.

Tabel 4. Ringkasan Pekerjaan Sarpras Pendidikan

Tahun	Contoh Pekerjaan Inti
2022	RKB & lab komputer (SDN 01 Lubuk Gadang, SDN 13 Simancuang); UKS (SDN 05 Tanggo Aka; SDN 04 Timbulan); perpustakaan (SDN 08 Taratak Baru).
2023	Perpustakaan & lab (SDN 17 Limau Kapeh); RKB+toilet+lab (SDN Sungai Kunyit); lab & UKS (SMPN 25, SMPN 29).
2024	Revitalisasi SDN 08 Karang Putih; revitalisasi 8 SD lain; pembangunan perpustakaan & lab (SMPN 8, 11, 14, 28).

Kesehatan. Anggaran meningkat: ±Rp3 miliar (2021) → 5 miliar (2022) → 8 miliar (2023) → 10 miliar (2024) → rencana 15 miliar (2025). Fokus: rehabilitasi RSUD/puskesmas/pustu, edukasi gizi, pengendalian stunting. Ringkas sarpras kunci (contoh esensial).

Tabel 5. Ringkasan Pekerjaan Fasilitas Kesehatan

Tahun	Contoh Pekerjaan Inti
2022	Rehabilitasi RSUD Solok Selatan & RSUD Batang Sangir; rehabilitasi 9 puskesmas prioritas.
2023	Rehabilitasi 7 puskesmas; pembangunan Pustu Talao.
2024	Rehabilitasi berat Puskesmas Sangir; rehabilitasi Pustu Sungai Lambai; pagar RSUD Batang Sangir.
2025*	Labkesmas; rehabilitasi pustu (Simancuang, Sungai Kunyit, Talantam). <i>rencana</i>

Ketenagakerjaan (BLK). Alokasi ±Rp1–2 miliar/tahun. Variasi pelatihan kaya pada 2021–2022 (garmen, otomotif, komputer, tata boga, las SMAW, listrik, alat berat, WUB, TIK), menyempit pada 2023–2025 karena keterbatasan alat/ruang praktik.

Tabel 6. Ringkasan Jenis Pelatihan BLK (2021–2025, esensial)

Tahun	Jenis Pelatihan yang Diselenggarakan	Keterangan Umum
2021–2022	Garmen Apparel, Otomotif, Komputer, Tata Boga, Las SMAW, Listrik, Alat Berat, Wirausaha Baru (WUB), Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Tahun dengan jumlah jenis pelatihan terbanyak. Fokus pada pengembangan keterampilan teknis dan kewirausahaan dasar sesuai kebutuhan industri lokal.
2023–2024	Garmen Apparel, Komputer, Otomotif	Terjadi penyusutan variasi jenis pelatihan karena keterbatasan anggaran dan peralatan. Fokus diarahkan pada tiga jenis pelatihan inti yang paling diminati masyarakat dan relevan dengan kebutuhan pasar kerja.
2025	Garmen Apparel, Tata Boga	Tahun dengan fokus pelatihan spesifik untuk peningkatan keterampilan praktis dan mendukung usaha mandiri masyarakat, terutama perempuan dan pemuda desa.



Gambar 3. Revitalisasi SDN 08 Karang Putih

Catatan pemerataan. Masyarakat wilayah inti merasakan dampak lebih cepat; nagari terpencil melaporkan kendala akses, bencana banjir yang mengganggu sekolah, serta fasilitas belajar dan kesehatan yang belum merata (testimoni Zulkifli; Nobel Herianto).

2) Strategi 2 – Peningkatan kualitas & akses layanan kesehatan (gizi, stunting, kompetensi nakes, JKN)

Dinas Kesehatan memprioritaskan pemantauan tumbuh kembang balita, edukasi gizi ibu hamil/keluarga, penyuluhan sekolah, serta penguatan peran bidan dan kader. Operasional posyandu berjalan bulanan di 294 posyandu dengan 1.376 kader; sebelumnya alat ukur standar terbatas dan kemudian diperkuat bantuan 271 anthropometry kit dari pusat (akhir 2024/2025 awal) sehingga akurasi ukur tumbuh kembang meningkat (Kemenkes RI, 2023–2024; Bappeda/Dinkes, 2025). Testimoni warga (Husna) menunjukkan manfaat nyata, namun pemerataan ke lokasi terpencil perlu penguatan.

3) Strategi 3 – Peningkatan berkelanjutan kualitas guru & manajemen sekolah

Pelatihan guru rutin: 12 sesi (2022), 15 sesi (2023), 10 sesi (2024) dengan fokus Kurikulum Merdeka; rata-rata 80–100 guru/tahun mengikuti sertifikasi. Lebih dari 30 kepala sekolah mengikuti Bimtek manajemen berbasis mutu (2022–2024). Implementasi pencatatan administrasi digital sederhana di sejumlah SMP mendukung tata kelola belajar (Kemendikbudristek, 2022; Dinas Pendidikan, 2025). Kendala: anggaran terbatas, sebaran guru tidak merata di daerah terpencil. (Letakkan “Gambar 4.6 Pelatihan Guru SMP” dan “Gambar 4.7 Pelatihan Guru SD”).

4) Strategi 4 – Perluasan volume & kualitas pelatihan vokasi/pemagangan

BLK berupaya memperluas jenis/jangkauan pelatihan, namun terbatas ruang praktik, peralatan mahal (mis. otomotif, alat berat, listrik), dan partisipasi dari wilayah terpencil. Meski demikian, mutu dijaga melalui kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan industri dan instruktur kompeten. Testimoni peserta (Mahendra otomotif; Eti Astuti tata boga) menunjukkan peningkatan keterampilan dan inisiatif wirausaha, meski fasilitas dan durasi latihan masih perlu diperkuat (ILO, 2021; BLK, 2025).

5) Strategi 5 – Peningkatan kualitas & keterampilan pencari kerja selaras kebutuhan industri

Program vokasi dan pemagangan diarahkan agar lulusan *employable* sekaligus mampu berwirausaha. Keterbatasan kapasitas ruang, instruktur, dan alat membuat tidak semua pendaftar terlayani; BLK mulai memperluas jejaring dengan dunia usaha lokal untuk penyaluran kerja (ILO, 2021; BLK, 2025).



Gambar 4. Pelatihan TIK

1) Kesesuaian program dengan sasaran IPM

Konstruksi program pada tiga pilar IPM pendidikan, kesehatan, dan standar hidup sudah *align* dengan kerangka IPM modern yang menekankan *capabilities* melalui *education attainment*, *health status*, dan *decent living* (UNDP, 2021). Peningkatan IPM Solok Selatan 2021–2024 (69,23 → 72,24) menandakan ada *policy traction*, terutama setelah perbaikan sarpras sekolah, penguatan layanan primer kesehatan, dan pelatihan vokasi (BPS Sumbar, 2024; Bappeda, 2025). Namun ketimpangan antar-wilayah masih menahan akselerasi.

2) Peran anggaran dan efisiensi alokasi

Fluktuasi belanja pendidikan (turun tajam pada 2024) berimplikasi pada pembatasan cakupan rehabilitasi dan pelatihan guru. Sebaliknya, kesehatan cenderung meningkat

sehingga fasilitas primer dan intervensi gizi bisa lebih agresif. Ini menunjukkan kebutuhan desain *budget mix* yang lebih seimbang lintas pilar IPM serta strategi pendanaan alternatif (kemitraan swasta, CSR, filantropi lokal) agar program tidak mudah terhenti (Bappeda/Dinkes/Disdik, 2025).

3) Kepatuhan prosedur dan *delivery chain*

SOP di pendidikan, kesehatan, dan BLK membantu konsistensi pelaksanaan serta memudahkan Monev. Kendala utama terletak pada *last-mile delivery*: pelaporan lintas-OPD belum seragam, SDM pelaksana terbatas, serta hambatan geografi (banjir, akses jalan) yang mengganggu layanan sekolah dan puskesmas. Penguatan *monitoring–evaluation–learning* berbasis data (dashboard lintas-OPD) dan *contingency plan* kebencanaan pada layanan dasar akan meningkatkan reliabilitas program (BPS, 2024; Dinkes/Disdik, 2025).

4) Capaian dan kesenjangan IPM.

Kenaikan IPM hingga 72,24 (2024) tetap di bawah rata-rata nasional 74,39 dan provinsi 76,43 (BPS Sumbar, 2024). *Gap* terutama dipicu (i) akses dan mutu layanan di nagari terpencil, (ii) sebaran guru dan nakes, dan (iii) kapasitas ekonomi rumah tangga yang rentan terhadap guncangan harga komoditas dan cuaca. Strategi akseleratif yang layak: *targeted intervention* wilayah rawan (banjir/akses), *teacher–health worker redistribution with incentives*, dan skema vokasi yang dikaitkan langsung dengan permintaan kerja lokal (agroforestri, perikanan air tawar, pariwisata alam, industri kecil olahan).

5) Implikasi kebijakan

- a) Prioritization & bundling. Bundel intervensi *school–clinic–skills* pada nagari prioritas akan memberi *multiplier effect* pada tiga dimensi IPM secara serentak (UNDP, 2021) (BPS, 2024).
- b) Pembiayaan campuran. Kembangkan *blended finance* (DAK/DAU + CSR + BUMNag) untuk sarpras sekolah/puskesmas & alat vokasi (Bappeda, 2025).
- c) Monev berbasis bukti. Terapkan *micro-Monev* triwulanan lintas-OPD dengan indikator hasil (kelulusan, *learning hours*, cakupan posyandu, *job placement* pascapelatihan) (Kemendikbudristek, 2022) (Kemenkes, 2023).
- d) Kemitraan industri. Perluas *industry linkage* dan *apprenticeship* untuk meningkatkan *employability* lulusan BLK (ILO, 2021).

Secara empiris, implementasi strategi sudah menggerakkan kenaikan IPM, namun akselerasi tertahan oleh fluktuasi anggaran pendidikan, sebaran layanan yang belum merata, dan keterbatasan fasilitas pelatihan. Penguatan *budget mix*, *bundled targeting* nagari terpencil, Monev berbasis data, dan perluasan kemitraan industri merupakan tuas kebijakan yang paling cepat memberi pengaruh pada tiga pilar IPM sekaligus (BPS Sumbar)

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan pada tiga pilar IPM pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan telah menghasilkan kemajuan terukur. Perbaikan sarana-prasarana sekolah, penguatan layanan primer kesehatan (termasuk intervensi gizi dan stunting), serta pelatihan vokasi melalui BLK berkontribusi pada peningkatan IPM dari 69,04 (2020) menjadi 72,24 (2024), walau masih di bawah rata-rata nasional 74,39 dan Provinsi Sumatera Barat 76,43 (BPS Sumbar, 2024). Secara substantif, desain program sudah selaras dengan kerangka IPM modern yang menekankan kapabilitas pada tiga dimensi (UNDP, 2021).

Kendala utama implementasi meliputi: (i) fluktuasi dan keterbatasan anggaran terutama pendidikan yang membatasi cakupan dan pemerataan; (ii) hambatan *delivery* di wilayah terpencil (akses, bencana banjir, sebaran guru/nakes); serta (iii) keterbatasan fasilitas dan kapasitas praktik pada pelatihan vokasi. Mekanisme SOP telah tersedia, namun efektivitas monitoring–evaluasi lintas-OPD belum sepenuhnya konsisten, sehingga umpan balik kebijakan belum optimal (Dinas Pendidikan/Dinas Kesehatan/BLK, 2025). Dengan demikian, implementasi dapat dikatakan cukup efektif tetapi belum merata, dan akselerasinya memerlukan penguatan pada sisi pendanaan, pemerataan layanan, serta tata kelola evaluasi berbasis data.

Saran dan Rekomendasi

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas fokus dengan mengintegrasikan analisis kuantitatif dan spasial agar dapat memetakan ketimpangan antarwilayah secara lebih rinci, termasuk mengukur dampak kebijakan pada setiap subdimensi IPM. Selain itu, studi komparatif antar kabupaten di Sumatera Barat juga dapat memberikan perspektif empiris tentang *best practices* dalam implementasi strategi pembangunan manusia daerah. Dari sisi praktis, pemerintah daerah perlu memperkuat sinergi antar-OPD, kemitraan publik-swasta, serta sistem pemantauan digital berbasis data real time agar evaluasi dan pengambilan keputusan dapat lebih cepat, akurat, dan berorientasi pada hasil pembangunan manusia yang berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Ainia, C., Suharso, P., & Hartanto, W. (2023). Analisis Faktor Yang Memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Pada 7 Daerah Tertinggal Di Pulau Sumatera Tahun 2016-2020. *JAMI: Jurnal Ahli Muda Indonesia*, 4(1), 81–88. <https://doi.org/10.46510/jami.v4i1.128>
- Alfayed, M. F., Andiny, P., Rizal, Y., & Safuridar. (2024). Pengaruh Belanja Modal, dan Indeks Pembangunan Manusia, Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *MENAWAN: Jurnal Riset Dan Publikasi Ilmu Ekonomi*, 3(1), 27–38. <https://doi.org/10.61132/menawan.v3i1.1083>
- Azfirmawarman, D., Magriasti, L., & Yulhendri. (2023). Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia (Kajian Perubahan Metodologi Penghitungan). *JURNAL PENDIDIKAN DAN KONSELING VOLUME*, 5(5), 117–125.
- Bashrihan, Martilova, N., & Fakultas. (2023). Analisis Disparitas Pembangunan Ekonomi dan Hubungannya dengan Investasi di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2021. *JEBI: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(4), 618–627.
- Hamid, R., Utami, B., Wijayanti, T., Candra Herawati, B., Perdana, A., Permana, D., Siswanto, A., Manaf, P., Iswahyudi, M., Susiang, M., & Hidayat, A. (2023). *MANAJEMEN STRATEGIS (Konsep dan Aplikasi dalam Bisnis)*.
- Kotler, P., Keller, K. L., & Chernev, A. (2021). *Marketing Management*. Pearson Education. <https://books.google.co.id/books?id=zXpfzgEACAAI>
- Mahmud, T. A., Untari, A. D., & Asmawi, M. (2025). Human Development Index and Sustainable Development Goals in Banten Province. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 4(1), 99–110. <https://doi.org/10.46843/jpm.v4i1.361>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2018). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications. <https://books.google.co.id/books?id=fjh2DwAAQBAJ>
- Moleong, L. J., & Surjaman, T. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remadja Karya. <https://books.google.co.id/books?id=YXsknQEACAAI>
- Mukroni, & Tjenreng, M. B. Z. (2025). Peran Camat dalam Meningkatkan Koordinasi Antar-Instansi untuk Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 6(6), 4605–4611.
- Muminah, S., & Suprajogo, T. (2025). Implementasi Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Pendekatan Bottom-Up. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 8(4), 1485–1495. <https://doi.org/10.37481/sjr.v8i4.1253>

- Nurrisa, F., Hermina, D., & Norlaila. (2025). Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian : Strategi, Tahapan , dan Analisis Data Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran (JTTP). *Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran (JTTP)*, 02(03), 793–800.
- Purwanto, B. H. (2021). *Manajemen Strategi Sektor Publik*. Pt. Refika Aditama. <https://books.google.co.id/books?id=JRXZzwEACAAJ>
- Putri, S. A., Zilrahmi, Permana, D., & Fitria, D. (2024). Factors Evaluation of Indonesia Human Index Development in 2023 Using PLS-SEM Method. *UNP Journal of Statistics and Data Science*, 2(3), 373–380. <https://doi.org/10.24036/ujsds/vol2-iss3/214>
- Raldo, A., & Samsuddin, M. A. (2025). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Barat. *JUKONI: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 02(02), 66–71. <https://doi.org/10.36441/snpk.vol4.2025.447>
- Salsabila, A., Ramadhani, Z., Purba, G., Zuanda, M. A., Asnidar, & Ridha, A. (2024). Peran Indeks Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Terhadap Kemiskinan dan Laju Pertumbuhan Penduduk Di Indonesia. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 4(1), 192–208. <https://doi.org/10.30640/inisiatif.v4i1.3485>
- Shobri, H., & Syahbudi, M. (2022). Analisis Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja Pendidik Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Di Sumatera Utara. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(4), 1191–1200.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sultan, Rahayu, H. C., & Purwiyanta. (2023). Analisis Pengaruh Kesejahteraan Masyarakat Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 5(1), 75–83. <https://doi.org/10.37034/infeb.v5i1.198>
- Sutardji. (2023). *Manajemen Strategis Sektor Publik: Teori dan Aplikasinya di Indonesia*. Zifatama Jawa. <https://books.google.co.id/books?id=Ftr2EAAAQBAJ>
- Sutrisna, I. W. (2020). Implementasi Kebijakan Desentralisasi Menuju Masyarakat Mandiri dan Sejahtera. *JURNAL CAKRAWARTI*, 3(1), 1–9.
- Wika, M. (2024). Efektivitas implementasi kebijakan publik dalam pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan. *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 1(6), 11384–11395. <https://jicnusanantara.com/index.php/jicn/article/view/2724%0Ahttps://jicnusanantara.com/index.php/jicn/article/download/2724/2884>
- Zulkarnain. (2018). Optimalisasi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kebijakan Pelayanan Publik Demi Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 08(02), 1–2.